

IMPLEMENTASI KETERSEDIAAN PENYELENGGARAAN LAYANAN PER- PUSTAKAAN, TAMAN BACAAN ATAU SUDUT BACA KOTA SURABAYA

Sri Roekminiati,

Dosen Universitas Dr. Soetomo Surabaya
e-mail: sriroekminiati@gmail.com

Fitria Ayuningrum

Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya
e-mail: ayumutia7@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara umum mengenai penyelenggaraan perpustakaan atau taman bacaan atau sudut baca di Rusun Sombo Kecamatan Simokerto Surabaya. Metode penelitian yang digunakan didasarkan pada penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat menggambarkan secara jelas terhadap masalah yang diteliti, dicatat, menganalisis serta menggambarkan kondisi-kondisi yang ada di lapangan berdasarkan sumber. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian implementasi penyelenggaraan taman baca di Rusun Sombo menunjukkan: (a) Penetapan tujuan taman bacaan yakni adanya perubahan dengan meningkatnya minat baca anak-anak dan budaya membaca sejak dini, (b) Sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana disediakan oleh Badan Arsip dan Perpustakaan (c) Pengelola taman baca kurang konsisten dalam melakukan sosialisasi karena sosialisasi yang dilakukan hanya sekali pada saat *launching* taman baca, (d) Masyarakat lebih menggantungkan keberadaan taman baca ini kepada Badan Arsip dan Perpustakaan, (e) Hubungan pengelola dengan organisasi masyarakat kurang terjalin dengan harmonis, (f) Pengelola menerima dan memahami tugas-tugas yang ada. Dan hambatan yang terjadi yakni kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang kurang memadai.

Kata Kunci: Implementasi, Perpustakaan, Sudut Baca

Implementation of The Provision of Library Services, Reading Park or Reading Corner in Surabaya City (A Case Study of Sombo Flat Simokerto Sub-district Surabaya City)

Abstract

This research aimed to broadly describe the library services or reading park or reading corner at Sombo Flat Simokerto Sub-district Surabaya City. It employed a descriptive qualitative method in which the problems based on the real conditions in the research locus were clearly illustrated examined, recorded, analyzed and described. The data were collected through interviews, observations and document reviews. The data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion making. The research result concerning the provision of reading park at Sombo Flat indicated that: (a) in term of goal setting, there was an increase in the children's interest in reading and reading culture since early childhood, (b) the resources covering human resources, budget and infrastructure were provided by the Local Archives and Library Agency, (c) the management of the reading park was less consistent in socializing the reading park because the socialization was only conducted once at the reading park launching event, (d) the citizens relied the maintenance of the reading park on the Local Archives and Library Agency, (e) The engagement between the reading park management and the citizens was not closely tight, (f) the reading park management comprehended and performed their jobs. The constraints faced included the lack of human resources and facilities.

Keyword: *Implementation, Library, Reading Corner*

A. LATAR BELAKANG

Dalam suatu negara memiliki cita-cita yang hendak dicapai, salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini juga merupakan salah satu cita-cita dari bangsa Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam

pembukaan undang-undang dasar 1945 alenia ke-4 yang berbunyi:

“ ...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia”.

Mencerdaskan kehidupan bangsa bisa dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan yang dapat mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab, seperti yang tertuang pada Undang-Undang No. 20, Tahun 2003 pasal 3 menyebutkan,

"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Pendidikan merupakan investasi yang sangat luar biasa bagi suatu negara. Dengan pendidikanlah Indonesia bisa terbebas dari jajahan Belanda. Penjajahan kurang lebih 350 tahun membuat rakyat Indonesia tidak memiliki pendidikan yang layak. Salah satu tokoh Perjuangan yaitu Dr. Sutomo merupakan pendiri organisasi pelajar pertama yang memberikan jalan bagi pelajar untuk menempuh pendidikan. Ini merupakan investasi yang ditanam pada zaman penjajahan, dan saat ini kita menerima hasilnya dengan terbebas dari penjajahan dan merdeka.

Kemerdekaan membuat rakyat berlomba-lomba dalam menempuh pendidikan. Menurut Badan Pusat Statistik, Angka partisipasi Sekolah (APS) dari tahun 2003 sampai tahun 2013 sedikit demi sedikit meningkat, untuk kelompok usia 7-12 tahun pada tahun 2003 mencapai 96,42% dan tahun 2013 mencapai 98,36%. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia sadar akan pentingnya pendidikan. Sayangnya masyarakat tentang pentingnya pendidikan tidak didukung dengan peningkatan mutu pendidikan baik formal maupun informal. Salah satu contoh dalam pendidikan formal yaitu adanya pengajaran yang di gunakan lebih banyak menggunakan jaringan internet dari pada buku. Padahal informasi yang diberikan dalam internet tidak mewakili semua ilmu yang berkembang saat ini. Hal ini membuat anak tidak memiliki budaya membaca buku.

Masyarakat Indonesia belum menjadikan kegiatan membaca sebagai sumber utama mendapatkan informasi. Masyarakat lebih memilih menonton televisi (85,9%), mendengarkan radio (40,3%) daripada membaca koran (23,5%). (sumber:www.bps.go.id, diakses 16 Desember 2014). Peneliti sangat prihatin melihat anak-anak Sekolah Dasar, lebih memilih untuk menonton Televisi dan bermain *Playstesion* dari pada membaca. Padahal di usia ini merupakan *Golden Age* atau lebih sering disebut dengan masa keemasan, masa-masa ini adalah masa-masa penting buat anak yang tidak bisa di ulang lagi, usia ini berkisar mulai 0 – 8 tahun. Di usia ini sangat mudah menanamkan kebiasaan anak untuk membaca.

Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Arsip dan Perpustakaan pada 2011 masih sekitar 26 persen warga Surabaya suka membaca, namun pada 2012 sudah naik menjadi 38 persen (sumber: www.bps.go.id, diakses tanggal 16 Desember 2014). Ini dikarenakan adanya 980 titik lokasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM) maupun perpustakaan.

Pemerintah Kota Surabaya berhasil meraih penghargaan dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) Award pada tahun 2013 yakni kategori pendidikan dengan bidang pengembangan layanan perpustakaan umum. Seperti yang dijelaskan di atas, Surabaya mempunyai 980 titik lokasi yang berada di sekolah, balai RW, puskesmas, rumah sakit, dan taman-taman. Hal ini disebabkan karena adanya Perda no 5 tahun 2009 pasal 7 ayat (2) yang berisi:

“Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca tempat dan/atau fasilitas umum dimaksud antara lain meliputi: tempat pelayanan kesehatan; tempat penyelenggaraan pendidikan; tempat ibadah; tempat kerja/perkantoran; pusat perbelanjaan; Rusun/apartemen/hotel; tempat rekreasi dan hiburan umum.”

Rumah susun (rusun) merupakan salah satu sasaran dalam Perda Kota Surabaya No 5 tahun 2009. Surabaya memiliki beberapa rusun, dan diantaranya yaitu Rusun Sombo. Dengan mayoritas penghuni dari kalangan Madura, rusun ini merupakan penduduk dengan tingkat ekonomi ke bawah. Dari sini penulis tertarik untuk meneliti “Implementasi Ketersediaan Penyelenggaraan Perpustakaan Atau Taman Atau Sudut Baca Di Rumah Susun Sombo Kecamatan Simokerto Surabaya”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah:

1. Bagaimana implementasi ketersediaan penyelenggaraan layanan perpustakaan atau taman bacaan atau sudut baca di Rusun Sombo Kecamatan Simokerto Surabaya.
2. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam implementasi ketersediaan penyelenggaraan layanan perpustakaan atau taman bacaan atau sudut baca di Rusun Sombo Kecamatan Simokerto Surabaya.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi keterdediaan penyelenggaraan perpustakaan atau taman bacaan atau sudut baca di Rusun Sombo Kecamatan Simokerto Surabaya dengan menggunakan teori implemetasi Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari beberapa variabel yaitu ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, kecenderungan badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, dan Kondisi sosial, ekonomi dan politik.
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan perpustakaan atau taman bacaan atau sudut baca di Rusun Sombo Kecamatan Simokerto Surabaya.

B. LANDASAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone dalam Budi Winarno (2007:17), ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan *public* dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungan”

Menurut Anderson dalam Budi Winarno (2007:20) kebijakan merupakan arahan tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Selanjutnya menurut Anderson konsep kebijakan publik ini kemudian mempunyai beberapa implikasi, yakni pertama, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem politik. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya. Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Keempat, kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah. Dengan kata lain pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk tidak melakukan campur tangan dalam bidang-bidang umum maupun khusus.

Menurut Nugroho (2009:98), tujuan kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya atau *resources*, yaitu 1) Mendistribusi sumber daya negara kepada masyarakat, termasuk alokatif, realokatif, dan redistribusi, versus mengabsorbsi atau menyerap sumber daya ke dalam negara. 2) Regulatif dan versus deregulatif. Kebijakan regulatif bersifat mengatur dan membatasi, seperti kebijakan tarif, kebijakan proteksi industri, kebijakan HAM, dan sebagainya. Kebijakan deregulatif bersifat membebaskan, seperti kebijakan privatisasi, kebijakan penghapusan tarif dan kebijakan pencabutan daftar negatif investasi. 3) dinamisasi versus stabilisasi. Kebijakan dinamisasi adalah kebijakan yang bersifat menggerakkan sumberdaya nasional untuk mencapai kemajuan tertentu yang dikehendaki. Kebijakan stabilisasi bersifat mengerem

dinamika yang terlalu tepat agar tidak merusak sistem yang ada, baik sistem politik, keamanan, ekonomi, maupun sosial. 4) Kebijakan yang memperkuat negara versus memperkuat pasar. Kebijakan yang memperkuat negara adalah kebijakan-kebijakan yang mendorong lebih besar peran negara, sementara kebijakan yang memperkuat pasar atau publik adalah kebijakan yang mendorong lebih besar peran publik atau mekanisme pasar daripada peran negara. Pada prakteknya, setiap kebijakan mengandung lebih dari satu tujuan kebijakan, yang berlainan. Kebijakan publik selalu mengandung multi-tujuan, yaitu untuk menjadikan kebijakan itu sebagai kebijakan yang adil dan seimbang dalam mendorong kemajuan kehidupan bersama.

Definisi Kebijakan Publik

Banyak sekali definisi mengenai kebijakan publik. Sebagian besar ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya. Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas, kebijakan publik sering diartikan sebagai 'apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan'. Kadang-kadang, kebijakan publik menunjuk pada istilah atau konsep untuk menjelaskan pilihan-pilihan tindakan tertentu yang sangat khas atau spesifik, seperti kepada bidang-bidang tertentu dalam sektor-sektor fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan atau kesejahteraan. Urusan-urusan yang menyangkut kelistrikan, air, jalan raya, sekolah, rumah-sakit, perumahan rakyat, lembaga-lembaga rehabilitasi sosial adalah beberapa contoh yang termasuk dalam bidang kebijakan publik. Sebagai contoh, kebijakan sosial secara ringkas dapat diartikan sebagai salah satu bentuk kebijakan publik yang mengatur urusan kesejahteraan. Kebijakan sosial secara khusus sejatinya adalah kebijakan kesejahteraan.

Istilah *policy* (kebijakan) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. (Wahab, 1997:2). United Nations atau Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB dalam Wahab (1997:2) mengartikan kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit,

kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat, kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindak tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

Ahli kebijakan Anderson (1979) dalam Wahab (1997:3), merumuskan bahwa kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Sedangkan Frederick (1963) dalam Wahab (1997:3) mendefinisikan "suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan".

Berdasarkan definisi di atas, dapatlah disimpulkan pengertian kebijakan sebagai suatu pedoman untuk melaksanakan kegiatan yang dipilih oleh seseorang atau kelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun, pengertian kebijakan publik (*public policy*).

Kita bisa menemukan lebih dari selusin definisi kebijakan publik, dan tidak ada dari satu definisi yang keliru, semuanya saling melengkapi. Namun, untuk kebutuhan sendiri menurut Nugroho dalam buku *Public Policy* (2009:85), merumuskan definisi sebagai berikut:

"Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan."

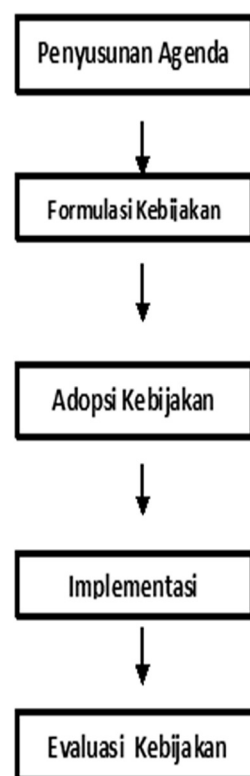
Dengan demikian, kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis daripada fakta politis ataupun teknis. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Sebagai sebuah strategi, kebijakan publik tidak saja bersifat positif, namun juga negatif, dalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain. Meskipun terdapat ruang bagi win-win sangat terbatas sehingga kebijakan publik

lebih banyak pada ranah *zero-sum-game*, yaitu menerima yang ini, dan menolak yang lain.

Proses Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Tahap-tahap kebijakan publik menurut Wiliam Dunn (1998:24-25).

1. Tahap penyusunan agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik, sebelumnya masalah-masalah ini melalui seleksi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan.
2. Tahap formulasi kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada.
3. Tahap adopsi kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus atara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. Tahap implementasi kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai pemecahan masalah harus diimplementasikan yakni, dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.
5. Tahap penilaian kebijakan
Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.



Sumber: Dunn (2000:24-25)

Gambar 1 Tahap-tahap Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan Publik

Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai pihak. Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam buku Leo Agustino (2006) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

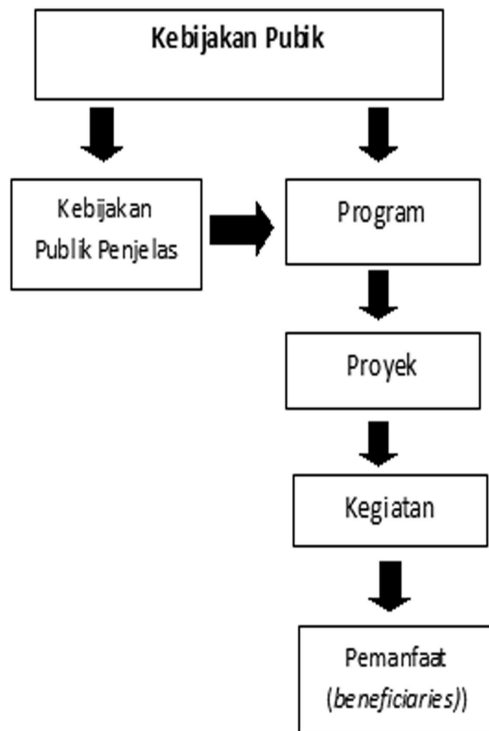
“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Sedangkan Van Meter dan Van Horn dalam bukunya Leo Agustino mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Nugroho (2009:494) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Nugroho (2009:495)

Gambar 2. Sekuensi Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain. Rangkaian implementasi kebijakan, dari gambar di atas, dapat dilihat dengan jelas, yaitu dimulai dari program, ke proyek, dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik.

Model Proses Implementasi Kebijakan

Dalam mengkaji implementasi kebijakan *public* sebelumnya perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga diperlukan model implementasi kebijakan untuk menyederhanakan pemahaman konsep implementasi kebijakan. Menurut George C. Edward III, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, yaitu: 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Disposisi dan 4) Struktur Birokrasi

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno mengatakan model ini mempunyai enam sisi yang membentuk ikatan antara kebijakan dan pencapaian. Metode ini tidak hanya menentukan hubungan antara variabel-variabel bebas dan terikat mengenai kepentingan-kepentingan melainkan juga menjelaskan hubungan antara variabel bebas. Seperti dideskripsikan di bawah ini:

- 1) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama faktor-faktor yang menentukan pencapaian kebijakan. Identifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan apabila tujuan-tujuan itu tidak di pertimbangkan.
- 2) Sumberdaya
 - a. Sumber daya manusia
Implementasi tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumberdaya manusia yang cukup dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dari segi kualitasnya sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya. Sedangkan dari segi kuantitasnya, sumberdaya manusia berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia yang ada di bidang pekerjaannya masing-masing.
 - b. Anggaran
Anggaran berkaitan dengan tersedianya kecukupan dana atas suatu

- program yang dilaksanakan, sebab tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, maka program-program kebijakan yang dilaksanakan tidak akan berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan tersebut.
- c. Fasilitas
Fasilitas prasarana dan sarana berkaitan dengan gedung, tanah, peralatan, dan sebagainya untuk menunjang keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan yang ada.
- 3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana
Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Menurut Van Horn dan Van Meter dalam Budi Winarno mengatakan prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut.
- 4) Karakteristik badan-badan pelaksana
Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno mengatakan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:
- a. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.
 - b. Tingkat pengawasan Hirarkhis terhadap keputusan-keputusan subunit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana.
 - c. Sumber-sumber politik suatu organisasi misalnya dukungan dari anggota legislative dan eksekutif.
 - d. Vitalitas suatu organisasi.
 - e. Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka yang diidentifikasi sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertical secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relative tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi.
 - f. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan "pembuat keputusan" atau "pelaksana keputusan".
 - g. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Ulul Albab kondisi lingkungan ini dapat berupa:

- a. Sumberdaya ekonomi yang tersedia dalam lingkungan masyarakat
- b. Opini Publik terhadap kebijakan
- c. Sikap elit dan kelompok kepentingan/ kelompok sasaran (*target group*) itu terorganisir.
- d. Kecenderungan Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno menyatakan ada tiga unsur mengidentifikasi tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: Kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

- 5) Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana

Disposition berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan (Nugroho: 2009:512). Menurut Van Meter dan Van Horn (1975:472) ada tiga unsur yang dapat mempengaruhi persepsi berpikir pelaksana dalam yurisdiksi di mana kebijakan tersebut disampaikan yaitu: a. pengetahuan (pemahaman, pengertian) dari kebijakan tersebut, b. respon mereka terhadap kebijakan (penerimaan, netralitas, penolakan), dan c. intensitas tanggapan. Pemahaman pelaksana tentang maksud umum, serta standar spesifik dan tujuan dari kebijakan tersebut, adalah penting. Selain itu, kegagalan implementasi mungkin ketika para pejabat tidak menyadari bahwa mereka tidak memahami sepenuhnya dengan kebijakan.

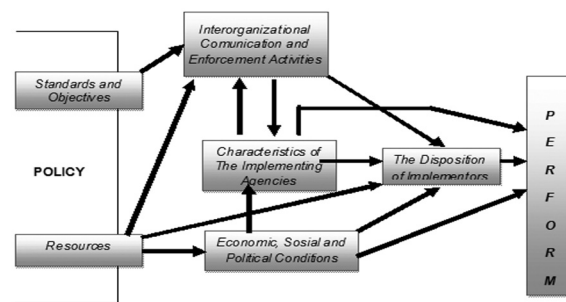
Arah disposisi pelaksana terhadap standar dan tujuan adalah sangat penting. Pelaksana mungkin gagal untuk melaksanakan kebijakan karena mereka menolak tujuan yang terkandung di dalamnya (Peltason, 1961; Dolbeare dan

Hammond, 1971; Etzioni, 1961; Wasby, 1970; dan Delthick, 1970 Meringkas fenomena ini Petrick (1968:7) telah menulis bahwa "muncul dari fakta bahwa kelompok-kelompok manusia merasa sulit untuk melakukan tindakan efektif yang mereka tidak memiliki keyakinan yang mendasari" (Van Meter dan Van Horn, 1975:473).

Akhirnya, intensitas disposisi pelaksana dapat mempengaruhi kinerja kebijakan. Intensitas preferensi negatif mungkin menyebabkan pembangkangan langsung dari program tujuan. Ketika ini terjadi pertanyaan pelaksanaan dapat menjadi diperdebatkan-bawahan (misalnya negara bagian dan daerah) dapat menolak untuk berpartisipasi dalam program ini sekaligus (lihat Bailey dan Mosher, 1968). Kurangnya sikap intens dapat menyebabkan pengalihan pelaksana untuk mencoba sembunyi-sembunyi dan menghindari, sebuah pola yang lebih umum (lihat, misalnya, Lazin, 1973 dalam Van Meter dan Van Horn (1975:473).

- 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975:475-476) adalah, sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik dimana kebijakan itu diimplementasikan. Kondisi lingkungan dapat berupa: (1) sumberdaya ekonomi yang tersedia dalam lingkungan masyarakat, (2) opini publik terhadap kebijakan, (3) sikap elit dan kelompok sasaran terhadap kebijakan, dan (4) sejauhmana kelompok kepentingan/sasaran itu diorganisir (Van Meter dan Van Horn, 1975:472). Kondisi lingkungan ini dapat mempengaruhi karakter lembaga pelaksana dan disposisi implementor dalam proses implementasi. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. Untuk lebih jelas

kaitan ke enam variabel terlihat dalam gambar berikut ini:



Sumber: Van Meter and Van Horn (1975:463)

Gambar 3. A Model of The Policy Implementation Process

Menurut Mazmanian dan Sabetier dalam teori implementasi yang diformulasikan oleh Mazmanian dan Sabetier dalam DR. Ulul Albab (2010) menyebutkan terdapat 3 variabel independen yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu:

- 1) Variabel "mudah tidaknya masalah dikendalikan" (*tracability of problem*)
 - a. Kesukaran-kesukaran teknis
 - b. Keberagaman perilaku yang diatur
 - c. Prosentase kelompok sasaran dibandingkan jumlah penduduk
 - d. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan
- 2) Variabel "kemampuan kebijakan menstruktur implementasi" (*ability of statute to structure implementation*) dan
 - a. Kejelasan dan konsistensi digunakan teori kausalitas yang memadai
 - b. Ketetapan alokasi sumber dana
 - c. Ketetapan hirarki didalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana
 - d. Aturan-aturan pembuatan keputusan dari badan pelaksana
 - e. Rekrutmen pejabat pelaksana
 - f. Akses formal pihak luar
- 3) Variabel "non kebijakan yang mempengaruhi implementasi" (*non-statutory variables affecting implementation*).
 - a. Kondisi sosial, ekonomi dan teknologi
 - b. Dukungan publik
 - c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok sasaran
 - d. Dukungan dari pejabat atasan
 - e. Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana

Menurut Grindle dalam Wibawa, implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implemensi dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Pelaksana program
6. Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap

Model Grindle ini lebih menitikberatkan pada konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, sasaran dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Menurut Hogwood dan Gunn dalam bukunya Solichin Abdul Wahab menjelaskan untuk dapat mengimplementasikan kebijaksanaan negara secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi Eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi Pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/Kendala yang serius

Beberapa kendala/hambatan (*constrains*) pada saat implementasi kebijaksanaan sering kali berada di luar kendali para administrator, sebab hambatan-hambatan itu memang di luar jangkauan wewenang kebijaksanaan dan badan pelaksana. Hambatan-hambatan tersebut di antaranya mungkin bersifat fisik dan politis. Bersifat politis dalam artian bahwa baik kebijaksanaan maupun tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melaksanakannya tidak diterima/tidak disepakati oleh pelbagai pihak yang kepentingannya terkait yang memiliki kekuasaan untuk membatalkannya.

- 2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai

Kerap kali muncul di antara kendala-kendala eksternal. Jadi kebijaksanaan yang memiliki tingkat kelayakan fisik dan politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Alasannya ialah terlalu banyak berharap dalam waktu yang terlalu pendek, khususnya jika persoalan menyangkut sikap dan perilaku.

- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.

Satu pihak harus dijamin tidak terdapat kendala-kendala pada semua tahapan proses implementasinya perpaduan di antara sumber-sumber tersebut harus benar-benar dapat disediakan.

- 4) Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.

Kebijakan kadang kala tidak dapat diimplementasikan secara efektif bukan lantaran ia telah diimplementasikan secara sembrono/asal-asalan. Penyebab dari kesemua ini karena kebijaksanaan itu telah didasari oleh tingkat pemahaman yang tidak memadai mengenai persoalan yang akan ditanggulangi, sebab-sebab timbulnya masalah dan cara pemecahannya; atau peluang-peluang yang tersedia untuk mengatasi masalahnya, sifat permasalahannya dan apa yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang-peluang itu.

- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Semakin banyak hubungan dalam mata rantai, semakin besar pula resiko bahwa beberapa di antaranya kelak terbukti amat lemah atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

- 6) Hubungan saling ketergantungan harus sangat kecil.

Implementasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat Badan Pelaksana tunggal (*single agency*), yang untuk keberhasilan misi yang diembannya,

Berbagai model implementasi kebijakan di atas, peneliti menggunakan model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn mempunyai enam sisi yang membentuk ikatan antara kebijakan dan pencapaian. Menurut peneliti

lebih cocok dan lengkap untuk menggambarkan implementasi kebijakan penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca.

Perpustakaan

Berikut ini merupakan pengertian perpustakaan menurut ahli perpustakaan dan sumber lain, diantaranya:

1. Menurut Sulistyio Basuki (2003) perpustakaan ialah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, atau gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual. Dalam pengertian buku dan terbitan lainnya termasuk di dalamnya semua bahan cetak (buku, majalah, laporan, *pamphlet*, *prosiding*, *manuskrip* (naskah), lembaran music, berbagai karya media audiovisual seperti film, *slaid* (*slide*), kaset, piringan hitam, bentuk mikro seperti mikro film, mikrofis dan *mikroburam* (*microopaqaque*).
2. Menurut IFLA (*International of Library Associations and Institutions*) "Perpustakaan merupakan kumpulan bahan tercetak dan non tercetak dan atau sumber informasi dalam komputer yang tersusun secara sistematis untuk kepentingan pemakai."
3. Menurut Sutarno dalam bukunya yang berjudul "Perpustakaan dan Masyarakat" (2003) perpustakaan adalah suatu ruangan, bagian dari gedung/bangunan, atau gedung itu sendiri, yang berisi buku-buku koleksi, yang disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga mudah dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk pembaca".
4. Menurut C. Larasati Milburga, dkk (1991) perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa tempat menyimpan koleksi bahan pustaka yang diatur secara sistematis dengan cara tertentu untuk digunakan secara berkesinambungan oleh pemakainya sebagai sumber informasi".
5. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perpustakaan berasal dari kata dasar "pustaka" yang berarti pustaka atau buku. "Perpustakaan" artinya kumpulan buku (bacaan dsb); bibliotek
6. Menurut Ibrahim Bafadal dalam bukunya yang berjudul "Pengelolaan Perpustakaan Sekolah (1992:5) menyebutkan bahwa

perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun bukan berupa buku (*non book material*) yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap pemakainya.

Menurut Darmono dalam bukunya yang berjudul "Manajemen dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah (2001) menyatakan bahwa fungsi perpustakaan Adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi Informasi
Perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan tercetak, terekam maupun koleksi lainnya agar para pengguna perpustakaan dapat:
 - a. Mengambil berbagai ide dari buku yang ditulis oleh para ahli dari berbagai bidang ilmu,
 - b. Menumbuhkan rasa percaya diri dalam menyerap informasi dalam berbagai bidang serta mempunyai kesempatan untuk dapat memilih informasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya,
 - c. Memperoleh kesempatan untuk mendapatkan berbagai informasi yang tersedia di perpustakaan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan,
 - d. Memperoleh informasi yang tersedia di perpustakaan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari hari di masyarakat,
- 2) Fungsi pendidikan
Perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan tercetak, terekam maupun koleksi lainnya sebagai sarana untuk menerapkan tujuan pendidikan. Melalui fungsi ini manfaat yang diperoleh adalah:
 - a. Agar pengguna perpustakaan mendapat kesempatan untuk mendidik diri sendiri secara berkesinambungan,
 - b. Untuk membangkitkan dan mengembangkan minat yang telah dimiliki pengguna yaitu dengan mempertinggi kreatifitas dan kegiatan intelektual.
 - c. Mempertinggi sikap sosial dan menciptakan masyarakat yang demokratis.

- d. Mempercepat penguasaan dalam bidang pengetahuan dan teknologi baru.
- 3) Fungsi kebudayaan
Perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan tercetak, terekam maupun koleksi lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk:
 - a. Meningkatkan mutu kehidupan dengan memanfaatkan berbagai informasi sebagai rekaman budaya bangsa untuk meningkatkan taraf hidup dan mutu kehidupan manusia baik secara individu maupun secara kelompok,
 - b. Membangkitkan minat terhadap kesenian dan keindahan, yang merupakan salah satu kebutuhan manusia terhadap cita rasa seni,
 - c. Mendorong tumbuhnya kreatifitas dalam berkesenian,
 - d. Mengembangkan sikap dan sifat hubungan manusia yang positif serta menunjang kehidupan antar budaya secara harmonis,
 - e. Menumbuhkan budaya baca di kalangan pengguna sebagai bekal penguasaan ahli teknologi.
 - 4) Fungsi rekreasi
Perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan tercetak, terekam maupun koleksi lainnya untuk:
 - a. Menciptakan kehidupan yang seimbang antara jasmani dan rohani,
 - b. Mengembangkan minat rekreasi pengguna melalui berbagai bacaan dan pemanfaatan waktu senggang,
 - c. Menunjang berbagai kegiatan kreatif serta hiburan yang positif.
 - 5) Fungsi penelitian
Sebagai fungsi penelitian perpustakaan menyediakan berbagai informasi untuk menunjang kegiatan penelitian. Informasi yang disajikan meliputi berbagai jenis dan bentuk informasi.
 - 6) Fungsi deposit
Sebagai fungsi deposit perpustakaan berkewajiban menyimpan dan melestarikan semua karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di wilayah Indonesia. Perpustakaan yang menjalankan fungsi deposit secara nasional adalah Perpustakaan Nasional. Sebagai fungsi deposit Perpustakaan Nasional merupakan

perpustakaan yang ditunjuk oleh UU No 4 Tahun 1990 yaitu Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di wilayah Republik Indonesia, atau karya cetak dan karya rekam tentang Indonesia yang diterbitkan di luar negeri, dan oleh lembaga atau importer diedarkan di wilayah Republik Indonesia.

Macam-macam Perpustakaan

Teknis perpustakaan yang ada di Indonesia tidak jauh berbeda dengan perpustakaan yang ada di seluruh dunia. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 11 Maret No.0103/0/1981 dalam Larasati Milburga, dkk disebutkan bahwa jenis-jenis perpustakaan meliputi Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Wilayah, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Keliling, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Perguruan Tinggi, dan Perpustakaan Khusus atau Dinas.

Perpustakaan Nasional adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh negara pada tingkat nasional. Perpustakaan ini merupakan tempat untuk mendokumentasikan seluruh penerbitan yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan. Perpustakaan wilayah berkedudukan di Ibu Kota Propinsi sebagai pusat kerja sama antar perpustakaan di wilayah propinsi menyimpan koleksi bahan koleksi bahan pustaka yang menyangkut propinsi, semua terbitan di wilayah perpustakaan umum, menjadi pusat kegiatan belajar, pelayanan informasi, penelitian dan rekreasi bagi seluruh lapisan masyarakat, meliputi perpustakaan umum Daerah tingkat II di Ibu Kota Kabupaten atau Kotamadya atau di tingkat bawahnya.

Perpustakaan keliling berfungsi sebagai perpustakaan umum yang melayani masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan perpustakaan umum, dengan mengunjungi pusat pemukiman masyarakat. Perpustakaan Sekolah, berfungsi sebagai pusat kegiatan belajar mengajar, pusat penelitian sederhana, pusat membaca untuk menambah ilmu pengetahuan dan rekreasi. Perpustakaan Perguruan Tinggi, berfungsi sebagai sarana kegiatan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perpustakaan Khusus atau Dinas, berfungsi sebagai pusat rekreasi dan penelitian serta sarana untuk

memperlancar pelaksanaan tugas instansi atau lembaga yang bersangkutan.

Jenis Layanan Perpustakaan

Jenis layanan ada beberapa macam dan biasanya dipengaruhi oleh jenis perpustakaan dan masyarakat yang dilayaninya. Beberapa jenis layanan perpustakaan antara lain:

- a. Layanan Peminjaman Bahan Pustaka (layanan sirkulasi), yaitu layanan kepada pemakai perpustakaan berupa peminjaman bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan. Menurut Darmono layanan sirkulasi adalah satu kegiatan di perpustakaan yang melayani peminjaman dan pengembalian buku. Menurut Sumardji (2001), kegiatan pelayanan sirkulasi adalah kegiatan meminjamkan koleksi perpustakaan kepada para pemakai (pengunjung) perpustakaan.
- b. Layanan Referensi, yaitu layanan yang diberikan oleh perpustakaan untuk koleksi-koleksi khusus seperti kamus, ensiklopedi, almanak, direktori, buku tahunan yang berisi informasi teknis dan singkat. Koleksi ini tidak boleh dibawa pulang oleh pengunjung dan hanya untuk dibaca di tempat.
- c. Layanan Ruang Baca, yaitu layanan yang diberikan oleh perpustakaan berupa tempat untuk melakukan kegiatan membaca di perpustakaan. Layanan ini diberikan untuk mengantisipasi pengguna perpustakaan yang tidak ingin meminjam untuk dibawa pulang akan tetapi mereka cukup membacanya di perpustakaan.
- d. Layanan Audio Visual, yaitu layanan perpustakaan khusus untuk bahan audio visual. Layanan ini meliputi peminjaman dan pemutaran film, video, *slide*, *filmstrip*. Bahan yang disediakan berupa film cerita, film dokumenter, atau film pengetahuan.
- e. Layanan Berceritera, layanan ini untuk perpustakaan anak-anak atau perpustakaan sekolah dasar. Layanan ini pada umumnya tidak bersifat tetap akan tetapi dilakukan secara terjadual. Bentuk layanan yang diberikan tidak bersifat perorangan.
- f. Layanan Jasa Dokumentasi, yaitu jasa layanan berupa penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pengunjung seperti terbitan pemerintah serta peraturan-

peraturan perundangan yang dikumpulkan oleh perpustakaan.

- g. Layanan Jasa Informasi
- h. Layanan Terjemahan
- i. Layanan Jasa Silang Layan
- j. Layanan Pembendelan dan Perbaikan Buku

Taman Baca

Taman baca lebih sering disebut sebagai Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sudah banyak bertumbuhan dalam masyarakat. Beberapa pengertian Taman Bacaan Masyarakat sebagai berikut:

1. Menurut Buku Pedoman Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat, Taman Bacaan Masyarakat adalah sebuah tempat/wadah yang didirikan dan dikelola baik masyarakat maupun pemerintah untuk memberikan akses layanan bahan bacaan bagi masyarakat sekitar sebagai sarana pembelajaran seumur hidup dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar TBM.
2. Menurut Sutarno NS, Taman Bacaan Masyarakat mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan hak masyarakat setempat dalam membangunnya, mengelola dan mengembangkannya. Dalam hal ini perlu dikembangkan rasa untuk ikut memiliki (*sense of bel onging*), ikut bertanggung jawab (*meluhangrukebi*).
3. Menurut Amrin dalam bukunya "Acuan Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat" (2011) Taman bacaan Masyarakat adalah sebuah lembaga atau unit layanan berbagai kebutuhan bahan bacaan yang dibutuhkan dan berguna bagi setiap orang per orang atau sekelompok masyarakat di desa atau di wilayah TBM berada dalam rangka meningkatkan minat baca dan mewujudkan masyarakat berbudaya baca.

Tujuan, Fungsi dan Peran Taman Bacaan

Menurut Buku pedoman Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat, tujuan taman bacaan masyarakat adalah:

1. Membangkitkan dan meningkatkan minat baca masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang cerdas dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menjadi sebuah wadah kegiatan belajar masyarakat.

3. Mendukung peningkatan kemampuan aksarawan baru dalam pembrantasan buta aksara sehingga tidak menjadi buta aksara kembali.

Menurut Buku pedoman Pengelolaan Taman bacaan Masyarakat, fungsi taman bacaan masyarakat adalah:

1. Sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk belajar mandiri, dan sebagai penunjang kurikulum program Pendidikan Luar Sekolah, khususnya program keaksaraan.
2. Sumber informasi yang bersumber dari buku dan bahan bacaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan warga belajar dan masyarakat setempat.
3. Sumber penelitian dengan menyediakan buku-buku dan bahan bacaan lainnya dalam studi kepustakaan.
4. Sumber rujukan yang menyediakan bahan referensi bagi pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya.
5. Sumber hiburan (*rekreatif*) yang menyediakan bahan-bahan bacaan yang sifatnya rekreatif untuk memanfaatkan waktu senggang untuk memperoleh pengetahuan/informasi baru yang menarik dan bermamfaat.

Menurut Sutarno N, peranan yang dapat dijalankan taman bacaan masyarakat antara lain: Secara umum taman bacaan masyarakat merupakan sumber informasi, pendidikan, penelitian, preservasi dan pelestarian khasanah budaya bangsa serta tempat rekreasi sehat, murah dan bermanfaat.

- a. Mempunyai peranan media atau jembatan yang berfungsi menghubungkan antara sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang terkadang di dalam koleksi yang dimiliki.
- b. Mempunyai peranan sebagai sarana untuk menjalin dan mengembangkan komunikasi antaras sesama pemakai, dan antara penyelenggara taman bacaan masyarakat dengan masyarakat yang dilayani.
- c. Dapat berperan sebagai lembaga untuk membangun minat baca, kegemaran membaca, kebiasaan membaca, dan budaya membaca, melalui penyedia berbagai bahan bacaan yang sesuai dengan memanfaatkan, keinginan dan kebutuhan masyarakat.
- d. Berperan aktif sebagai fasilitator, mediator, motivator bagi mereka yang ingin mencari,

memanfaatkan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya.

- e. Merupakan agen perubahan, agen pembangunan, dan agen kebudayaan manusia.
- f. Berperan sebagai lembaga pendidikan nonformal bagi anggota masyarakat dan penunjang taman bacaan masyarakat. Mereka dapat belajar mandiri (*otodidak*), melakukan penelitian, menggali, memanfaatkan dan mengembangkan sumber informasi dan ilmu pengetahuan.
- g. Petugas taman bacaan masyarakat dapat berperan sebagai pembimbing dan memberikan konsultasi kepada pemakai atau melakukan pendidikan pemakai (*user education*), dan pembinaan serta menanamkan pemahaman tentang pentingnya taman bacaan masyarakat bagi orang banyak.
- h. Menghimpun dan melestarikan koleksi bahan pustaka agar tetap dalam keadaan baik semua karya manusia yang tidak ternilai harganya.

Dari uraian diatas dapat digambarkan bahwa peran taman bacaan masyarakat merupakan sumber informasi yang sangat penting bagi pengetahuan dan sebagai sarana untuk membangun komunitas antara sesama pengguna taman baca masyarakat. Taman Bacaan Masyarakat dapat juga berperan sebagai pembimbing dan memberikan konsultasi kepada pengguna dan pembinaan serta menanamkan pentingnya taman bacaan masyarakat bagi orang banyak.

Koleksi Taman Bacaan

Menurut Buku Pedoman Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat, jumlah koleksi TBM minimal 300 judul, terdiri atas buku, majalah, surat kabar, *leaflet*, dan bahan audio visual. Dalam rangka pengembangan dan pembinaan minat baca masyarakat maka diharapkan koleksi terbesar dari 1 (satu) unit TBM adalah 40% bahan bacaan hiburan, 30% ilmu pengetahuan praktis, sedang sisanya 30% adalah ilmu-ilmu lainnya seperti agama, politik, kesenian, hukum, pendidikan, (d disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat).

Menurut Amrin (2011) koleksi pada taman bacaan masyarakat harusnya disesuaikan dengan kebutuhan warga setempat, misalnya masyarakat yang ada di daerah pertanian

sawah, kebutuhan sarana bacaanya adalah berbeda dengan masyarakat yang ada di daerah perkebunan kelapa sawit. Atau masyarakat yang ada di pegunungan dengan masyarakat di pantai atau masyarakat yang tinggal dipertanian akan sangat berbeda dengan kebutuhan sarana bacaannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa koleksi taman bacaan masyarakat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian maka informasi ilmu pengetahuan yang dibaca, digali, ditemukan di TBM dapat dikaji, diteliti, dikembangkan, disalurkan, dan disebarluaskan secara terus-menerus tanpa ada habisnya.

Layanan Pada Taman Baca

Layanan TBM yang dibutuhkan masyarakatnya adalah:

1. Suasana TBM
Ruang TBM hendaknya dapat menyenangkan pengunjung. Oleh karena itu harus diatur agar tetap bersih, sejuk, tentram, rapi dan aman juga termasuk pengaturan mobiler dan peralatan/perlengkapan lainnya sehingga pengunjung merasa senang berada di ruang TBM.
2. Tenaga Pelayanan
Tenaga pelayanan TBM sebaiknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki pengetahuan dasar tentang pengelolaan TBM
 - b. Memiliki kemauan dan kemampuan untuk melayani orang dengan ramah, sopan, teliti, tekun dan senang membaca
 - c. Berpenampilan menyenangkan sehingga orang tidak segan bertanya atau meminta pertolongan
 - d. Pandai bergaul sehingga orang merasakan dekat dan diperhartikan.
3. Sistem Layanan TBM
TBM menggunakan sistem layanan terbuka sehingga pengunjung/pengguna dapat masuk ke ruang baca untuk memilih dan mengambil bahan bacaan sendiri di rak, atau dapat pula minta bantuan dari petugas. Mereka menggunakan sarana/tempat baca dengan bebas.
4. Jenis kegiatan pelayanan
 - a. Layanan membaca, yaitu memanfaatkan bahan bacaan seperti buku, majalah, surat kabar dan lain-lain untuk membaca di ruang baca.

- b. Peraturan sirkulasi (peminjaman) yaitu peminjaman buku untuk dibawa ke rumah atau di luar ruangan TBM. Pengguna yang boleh meminjam buku hanyalah anggota yang telah terdaftar.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif. Metode ini sangat membantu dalam menemukan dan memahami kejadian-kejadian yang ada. Dan memiliki tingkat kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan karena metode ini menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Peneliti pergi ke Rusun Sombo Kecamatan Simokerto, memahami dan mempelajari situasi. Studi dilakukan pada waktu interaksi berlangsung di tempat kejadian.

Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi lokasi penelitian dan dokumentasi. Peneliti mencari data tentang perpustakaan atau taman atau sudut baca di Rusun Sombo dari data tersebut peneliti meminta tanggapan kepada pengelola taman baca Rusun sombo sebagai *key informan*, Bapak RW dan pengunjung taman baca tersebut. Sambil melakukan pengamatan peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Data yang telah terkumpulkan di analisa dengan analisa data kualitatif.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Ukuran-Ukuran dan Tujuan-tujuan

Penetapan tujuan keberadaan perpustakaan atau taman atau sudut baca di Kota Surabaya yaitu untuk menumbuhkan minat baca masyarakat Kota Surabaya di semua lapisan masyarakat baik anak-anak sampai dewasa. Pengelola taman baca di Rusun Sombo menetapkan tujuan dan sasaran dari taman baca ini sebagai berikut:

1. Adanya perubahan pada anak-anak di Rusun Sombo dengan gemar membaca.
2. Terbentuknya budaya membaca pada anak-anak sejak dini.
3. Menjadi tempat rujukan anak-anak untuk belajar.

Dan penetapan tujuan tersebut tampaknya sesuai dengan hasil yang ada lokasi penelitian dimana anak-anak lebih suka membaca dengan adanya. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Rukun Warga (Bapak Abdullah)

"...efektif buat anak-anak cuman mungkin tinggal pengembangan pengelolaan sehingga bagaimana bisa anak-anak itu lebih giat membaca lagi, punya minat baca lebih tinggi lagi". (wawancara dengan bapak Abdullah selaku kepala rukun warga di RusunSombo pada tanggal 3 Februari 2015).

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Sdr. Endro Wijaya selaku pengelola taman baca di Rusun Sombo melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2015 dengan, beliau menjelaskan:

"...adanya perubahan dari masyarakat dari rusun Sombo khususnya anak-anak, perubahan-perubahan yang menjadikan anak selalu gemar membaca dan membudidayakan anak-anak sejak dini untuk selalu suka membaca khususnya kebutuhan sekolah belajar mengajar harus dilakukan di perpustakaan dan itu tidak mengganggu belajar di rumah".

Dari hasil wawancara yang di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran keberadaan taman baca di Rusun Sombo sudah selaras dengan Peraturan Daerah No 5 tahun 2009 bahwa dengan adanya keberadaan perpustakaan atau taman atau sudut baca di Kota Surabaya ini dapat menumbuhkan minat baca masyarakat Kota Surabaya di semua lapisan masyarakat baik anak-anak sampai dewasa.

2. Sumberdaya

a. Sumber daya manusia

Implementasi tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumberdaya manusia yang cukup dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dari segi kualitasnya sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya. Sedangkan dari segi kuantitasnya, sumberdaya manusia berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia yang ada di bidang pekerjaannya masing-masing. Hasil wawancara dengan Ibu Erna Farida pada tanggal 14 Februari 2015, beliau mengatakan:

"... Kalo cara merekrutnya itu sangat-sangat ketat sekali ya pimpinan itu perekrutan itu sampe 8 lapis jadi mulai administrasi, mulai dari tes IQ, juga tes kepribadian juga itu tadi banyak sekali tes komputer juga jadi tidak hanya mereka itu bisa

ngomong tetapi harus apa ya dengan anak kecil itu dengan gambar-gambar itu sampe 8 lapis..."

Beliau menambahkan:

"...Jadi awal masuk mereka kalo sudah tes, tesnya sudah melampaui semuanya sudah terlewati itu nanti akan di diklat selama satu bulan mereka, mulai dari diklat teknik dan nanti ada magangnya juga setelah magang itu tadi mereka tidak secara langsung di terjunkan nanti ada koordinator yang membina dan juga ada sub koordinator. ada beberapa lapis nanti mereka sampe terus ada pelatihan itu tadi, dengan pelatihan dengan pengarah tiap bulan itu tadi.."

Selanjutnya Ibu Erna Farida menambahkan:

"...petugas tadi, pimpinan sudah semaksimal mungkin ya dengan tiap pertemuan dengan mengikutkan Diklat atau Pelatihan seperti pelatihan map mapping terus speed reading terus latihan menulis, baca cepat itu tadi sudah berusaha semaksimal mungkin ya tidak hanya satu bulan sekali mereka di ajak latihan di tambah ilmunya itu tadi hampir seminggu sekali ya. Kalo saya rasa seminggu sekali..."

Sedangkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Sdr. Endro Wijaya pada tanggal 30 Januari 2015, beliau mengatakan:

"...gak onok pelatihan mbk, magang tapi sak ulan magang nak kurnianto (salah satu Taman Bacaan) administrasi yo belajar-belajar teko kurnianto" (tidak ada mbk, magang tapi hanya satu bulan magang di Kurnianto (salah satu taman bacaan) administrasi ya belajar-belajar sendiri dari Kurnianto)

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat di tarik kesimpulan beberapa poin, diantaranya:

1. Perekrutan petugas untuk perpustakaan di tempuh melalui beberapa tes dan seleksi yang ketat.
2. Petugas yang sudah di nyatakan lolos diberikan pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang dilakukan selama satu bulan. Petugas tidak langsung di terjunkan melainkan di berikan magang dan di berikan pembinaan oleh Koordinator dan Sub koordinator.
3. Adanya pengarah dan pelatihan tiap minggu untuk petugas.
4. Pengelola taman baca di RusunSombo tidak mengikuti Diklat selama satu bulan melainkan di ganti dengang magang di salah satu Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sumber daya pengelola Taman Baca di

Rusun Sombo sudah memadai dan profesional di bidangnya.

b. Anggaran

Dalam mencapai sebuah keberhasilan dalam suatu kebijakan diperlukan sumber daya dalam melaksanakannya. Van Mater dan Van Horn dalam Joko Widodo (2008) menegaskan bahwa:

"Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan."

Sumberdaya ini dapat berupa dana (*funds*) atau insentif lain, yang diperlukan untuk membiayai aktivitas. Hasil dari wawancara peneliti dengan Sdr. Endro Wijaya petugas pengelola taman baca di Rusun sombo mengemukakan:

"...saya di tugaskan ini dari Badan Arsip dan Perpustakaan dan di gaji juga oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya. (wawancara dengan pengelola taman baca di Rusun Sombo pada tanggal 30-1-2015)

Hasil wawancara dengan Ibu Erna Farida pada tanggal 14 Februari 2015, beliau mengemukakan:

"...Di Badan Arsip dan Perpustakaan itu kalo bagian pengajiannya, masalah anggarannya itu anggaran petugas termasuk di bagian pelayanan dan informasi

Beliau menambahkan:

"...Dari APBD dan APBN..."

Seperti yang diungkapkan oleh Sdr. Endro Wijaya dan Ibu Erna Farida bahwa: anggaran untuk insentif petugas perpustakaan di peroleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

3. Fasilitas

Fasilitas prasarana dan sarana berkaitan dengan gedung, tanah, peralatan, dan sebagainya untuk menunjang keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan yang ada. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan ini dari pengelola perpustakaan di RusunSombo ini sudah berusaha menyediakan dan

memanfaatkan sumber daya yang ada. Selain beberapa fasilitas di dapat dari Badan Arsip dan Perpustakaan, pengelola juga membantu mengupayakan beberapa penambahan dalam pelayanan. Seperti yang diungkapkan oleh Sdr. Endro Wijaya selaku pengelola taman baca di Rusun Sombo sebagai berikut:

"...Badan Arsip dan Perpustakaan, itu semuanya sarana buku, permainan, dan ada lagi yang membuat saya menghibahkan untuk membuat sarana ini menjadi ramai saya tambahkan permainan secara pribadi, dan menambah koleksi buku secara pribadi dan menambahkan koleksi buku dengan cara hibah yaitu meminta ato dengan seiklasnya para masyarakat untuk menyumbangkan buku yang tidak terpakai". (wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2015)

Hal ini dibenarkan oleh Ibu Erna Farida mengatakan:

"...Fasilitas itu jadi mulai dari terutama buku ya koleksi itu tadi, habis itu rak buku, terus meja baca dan juga bener atau plakat itu tadi. Insyallah kalo yang baru itu memang kan sarana prasarananya kan harus ada lelang juga nanti biasanya bawa buku dulu yang masih baru TBM yang baru..." (wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2015)

Beliau menambahkan:

".....Itu dari APBD tapi di kelola oleh bagian pengelohan jadi bagian sarana prasarana semua dari pengolahan dari sistem lelang ada sistem penunjukan langsung..."

Namun disisi lain masyarakat pengguna jasa juga mengeluhkan tentang kurangnya fasilitas yang ada dalam penyelenggaraan taman baca di Rusun Sombo ini. Mulai dari ruangan yang tidak memadai, fasilitas toilet dan kurangnya koleksi buku. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Abdullah selaku kepala rukun warga di RusunSombo menyatakan:

"....Terutama lahan, terus koleksi buku, terus fasilitas-fasilitas yang ada di taman bacaan itu misalkan runagan iku lebih enak ditempati ohhh yoposeh sirkulasi udarane, ooh yoposeh peneranganya nah iku perlu juga kan mbk. Mungkin ini tidak pernah dikaji kalo ngomong kaji mungkin terlalu tinggi, yang tidak pernah dievaluasi oleh petugas yang disini. Terkadang petugas sendiri ini kewenangannya terbatas sudah menyampaikan lah mungkin kekurangan-kekurangan yang ada disini. Tapi biasanya kendala itu anggaran ini alasan yang sudah menjadi rahasia umum pasti, sek pak dianggarno tahun depan. Kayaknya pemerintah seng penting onok sek untuk pengembangannya lain lagi". (wawancara dengan kepala rukun warga Rusun Sombo pada tanggal 3 Februari 2015)

Dan menurut ibu Siti Aminah sebagai pengunjung dari perpustakaan Rusun sombo, beliau mengatakan:

“...kamar kecil, taman dari dulu saya suruh kasih taman tapi terbentur sama len. Buku ceritanya kurang mbk, bukunya itu kok gak ada apa ya mbok sesekali waktu ganti buku baru ato di tambah buku baru buat tambahan koleksinya masak saya setiap kali Tanya, mas onok buku ini mas? Gak ada ibu.Buku resep, buku cerita yang unu ibu atau orang dewasa juga gak ada, kan hanya itu-itu aja mbok sekali-sekali 3 bulan sekali ato 6 bulan sekali kalo dirasa satu bulan sekali kedekatan ya di ada tambahan buku baru”. (wawancara dengan pengguna ibu Siti Aminah pada tanggal 3 Februari 2015)

3. Komunikasi

Agar kebijakan dapat terlaksana dengan efektif perlunya implementor memahami standart dan tujuan dari kebijakan. Implementor bertanggung jawab dalam mengkomunikasikan standart dan tujuan dari kebijakan agar lebih jelas. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*). Dalam implemetasi penyelenggaraan perpustakaan atau taman atau sudut baca di Rusun Sombo ini pengelola sudah mengkomunikasikan keberadaan taman baca ini melalui sosialisasi kepada masyarakat meskipun masih perlu melakukan inovasi-inovasi agar menarik minat baca utamanya anak-anak. Hal selaras dengan kutipan wawancara yang dilakukan dengan informan Sdr Endro:

“...awal di buat program perpustakaan ini, saya berinisiatif menyebarkan dan sosialisasi tentang adanya perpustakaan ini sangatlah penting sesungguhnya untuk membantu segi wawasan dan segi dalam pendidikan itu baik ibu-ibu orang dewasa dan khususnya anak-anak lebih dominan hampir setiap hari berkunjung”

“...Aku biyen gae spanduk gedhe mbk, tak kei bendera nisan, tak kei tempat sampah maringono riyoyoan kan prei ilang kabeh mbk sak tanaman...”

Namun yang menjadi kekurangannya dalam mengkomunikasikan keberadaan taman baca di Rusun Sombo ini pengelola belum konsisten, cenderung lebih pasif. Sosialisasi hanya dilakukan di awal taman baca di Rusun Sombo ini dibangun yang disosialisasikan oleh Arini Pakistyaningsih sebagai Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan. Bapak Abdullah selaku kepala rukun warga di Rusun Sombo ini mengatakan:

“...Sosialisasinya hanya lewat ini, ketua RW waktu rencana cuman itu aja. Makanya ini petugas

karena mungkin setiap tahun lebih roling ganti akhirnya mungkin rencana-rencana mereka itu mungkin tidak bisa ditindak lanjuti oleh yang baru. Kalo gak tau sudah 3 tahun lebih toh 2008, yang jelas warga sudah banyak yang tau terutama anak-anak kan cuman mereka kan selama ini kan tidak tau fungsi TB ini apa seh karena kurangnya sosialisasi ini. tapi kalo mereka punya inovasi TB ini mengadakan kegiatan ngene-ngene ben diketahui oleh masyarakat ohh minimalah lomba menggambar, lomba begini untuk ibu-ibu dengan adanya buku-buku itu resep-resep memasak ayo iki lomba memasak resepe kayak iki. Iki kembali lagi anggaran intine engkok anggaran maneh”. (wawancara dengan kepala rukun warga RusunSombo Bapak Abdullah pada tanggal 3 Februari 2015)

Sedangkan menurut pengunjung perpustakaan Rusun Sombo ibu Siti Aminah mengemukakan:

“...Pada saat ada launching pada saat ada bu Arini PAUD ini diundang. Pada tahun 2009, bu Arini sendiri yang launching.” Wawancara dengan pengguna ibu Siti Aminah pada tanggal 3 Februari 2015)

4. Karakteristik Badan-badan Pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan pelaksana seperti yang dinyatakan oleh van Meter and Van Horn karakteristik badan pelaksana mencakup norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi. Menurut bapak Abdullah selaku kepala rukun warga Rusun Sombo menyatakan:

“...setiap setahun sering terjadi rolling petugas, sehingga masing-masing petugas ini kan ada yang komunikatif kadang ada yang pasif. Kalo yang sebelum ini komunikatif sekali sering diskusi sering menyampaikan laporan-laporan, tapi kalo yang baru ini kurang komunikatif orangnya sehingga kami mau memberikan masukan-masukan juga agak sulit. Saya sebenarnya ingin mereka ini juga bisa menjadi penyambung aspirasi warga disini kepada Badan Arsip dan Perpustakaan iki low masukan dari warga melalui RW begini begini ini memang jarang kalo yang ini memang jarang sekali. Kalo misalkan ini dari evaluasi begini-begini enak.e piye. Kita disini banyak lahan kosong di Rusun ini terutama blok bc ada bangunan seperti yang sebenarnya bisa dimanfaatkan tapi kayaknya temen-temen dari Badan Arsip inikan seng penting aku mengelola begitu tanpa punya pikiran-pikiran negatif seperti apa sehingga anak-anak ini punya minat untuk datang, untuk membaca”. (wawancara dengan kepala Rusun Sombo pada tanggal 3 Februari 2015)

Dari hasil wawancara ini menyebutkan bahwa pengelola taman baca selaku penyelenggara kebijakan ini memiliki hubungan yang kurang terbuka terhadap organisasi warga yang dimaksud adalah Rukun Warga (RW), tetapi hubungan dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya cukup baik. Dimana taman baca ini akan tambah berkembang apabila banyak orang memiliki andil dalam membangun taman baca ini.

5. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana

Dalam melaksanakan kebijakan ke-cenderung atau sikap implementor di lihat dari beberapa unsur diantaranya kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intesitas tanggapan itu Di lihat dalam penelitian ini petugas dari perpustakaan Rusun Sombo memiliki kemauan dalam mengimplentasikan kebijakan ini sebagai bukti dia melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dari perpustakaan ini, ini menandakan bahwa pengelola menerima kebijakan yang ada dan tidak ada penolakan. Hanya saja pribadi pengelola yang pemalu sehingga mempengaruhi warga dalam memberikan saran. Berikut hasil wawancara dengan petugas perpustakaan rusun Sombo Endro Wijaya menyebutkan:

"...ada juga dari saya pribadi membuat kegiatan-kegiatan supaya anak-anak dan masyarakat yang datang kesini tidak jenuh itu kami membuat kegiatan-kegiatan seperti mewarnai, keterampilan, mengajari origami, bimbel, dan memberikan fasilitas mainan biar tidak jenuh seperti pazel, rumah balok, berhitung balok dan dakon dll". (wawancara dengan Sdr. Endro selaku pengelola perpustakaan di Rusun Sombo kecamatan Simokerto, Surabaya)

Sedangkan menurut Ibu Siti Aminah selaku pengunjung, beliau mengemukakan:

"...Baik, cuman ya pemalu gak kayak yang dulu akrab. Tapi yo sek apikan hendro, hendro iki bersihan anaknyanya mesti bersih-bersih terus. Kalo lagi lap-lap mesti tak goda ngene mbk mas baringene nggonku yoo. Kalo yang ini rajin mbk kalo sama anak-anak itu kayak kreatif gitu, anak-anak itu di kasih wawasan kayak mau perlu belajar disini bisa, kayak menggambar apa bagus kalo menggambar itu, gambarnya semua yang ditempel cuman emang pemalu tok.." (wawancara dengan pengguna Ibu Siti Aminah pada tanggal 3 Februari 2015)

6. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Dari penelitian yang dilakukan dapat diperoleh data bahwa kebutuhan akan perpustakaan ini tidak hanya untuk anak-anak melainkan seluruh elemen masyarakat seperti remaja dan dewasa. Masyarakat menginginkan tersedianya perpustakaan untuk menambah informasi perkembangan terkini. Namun setelah ada perpustakaan apa yang di harapkan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. Masyarakat menginginkan adanya koleksi yang *up to date* baik berupa buku, majalah maupun koran.

Di lihat dari tingkat ekonomi masyarakat Rusun Sombo termasuk golongan masyarakat menengah kebawah karena jika diamati, masyarakat tidak bisa mandiri dalam melengkapi fasilitas yang kurang seperti buku yang hanya menunggu bantuan dari Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya. Tidak ada upaya dari masyarakat untuk memenuhi sendiri kebutuhan agar taman baca di Rusun Sombo ini bisa berkembang.

Penulis mencoba membuat matriks untuk mempermudah membaca hasil penelitian yang telah dilakukan:

Tabel 1. Matriks Hasil Penelitian

No.	Variabel	Uraian
1.	Ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan	Pengelola menetapkan tujuan selaras dengan PERDA No 5 tahun 2009 yaitu adanya perubahan minat baca anak dan dewasa.
2.	Sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya manusia dipilih melalui seleksi yang ketat dan menempuh pelatihan dan magang. Pelatihan dan pembinaan dilakukan setiap minggu. • Anggaran diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di kelola bagian Layanan dan Informasi Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya • Fasilitas yang ada di dapat dari Badan Arsip dan Perpustakaan, ada beberapa fasilitas yang kurang diantaranya ketersediaan kamar kecil dan kurangnya koleksi buku
3.	Komunikasi	Sosialisasi dilakukan pada saat awal kali taman baca ini berdiri dan petugas kurang konsisten dalam mensosialisasikan keberadaan taman baca ini.
4.	Karakteristik Badan Pelaksana	Hubungan pengelola dengan organisasi Warga (RW) kurang baik. Meskipun dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya Harmonis.
5.	Sikap/ Kecenderungan Badan Pelaksana	Pengelola memahami tugas-tugas untuk menjalankan taman baca dan menerima aturan yang ada namun pengelola mempunyai sifat pemalu sehingga menjadi kendala.
6.	Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik	Opini yang berkembang keberadaan taman baca ini belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan informasi karena kurangnya koleksi buku. Di samping itu adanya keterbatasan ekonomi warga juga membuat Taman Baca kurang berkembang.

Hambatan

1. Kurangnya sumber daya manusia dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas pengelola kurang dari segi keterampilan dalam membagi pekerjaan dalam melayani pengunjung dan kurang komunikatif sehingga di butuhkan beberapa petugas untuk menjalankan taman baca di Rusun Sombo ini.
2. Fasilitas yang kurang memadai dimana ketika hujan turun ruangan bocor dan merusak sarana prasarana yang lain.

Di kutip dari pernyataan Sdr. Endro Wijaya selaku pengelola taman baca Rusun Sombo, beliau mengungkapkan:

“kendalanya satu, saya pribadi kan bekerja sendirian tidak ada pengawasan untuk anak-anak ada yang pinjem tidak dikembalikan buku banyak yang hilang, kendala lagi musim hujan juga tempat ini mengalami kebocoran butuh waktu untuk mengeringkan karpet itu. Kendala di masyarakat ini belum ada.”

Dan pernyataan dari Bapak Abdullah selaku Kepala Rukun Warga Rusun Sombo, beliau mengungkapkan:

“setiap setahun sering terjadi rolling petugas, sehingga masing-masing petugas ini kan ada yang komunikatif kadang ada yang pasif”

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

1. Implementasi penyelenggaraan taman baca di Rusun Sombo masih banyak yang perlu ada perbaikan dari aspek sumber daya, komunikasi, dan badan pelaksana.
2. Hambatan yang terjadi dalam implementasi penyelenggaraan taman baca di Rusun Sombo ini kurang sumber daya manusia dari segi kualitas maupun kuantitas, fasilitas yang kurang memadai di mana taman bacaan selalu bocor saat musim hujan.

REKOMENDASI

Adanya hambatan yang terjadi dalam penyelenggaraan perpustakaan/taman/sudut baca di Rusun Sombo Kecamatan Simokerto penulis memberikan saran kepada pengelola taman baca di Rusun Sombo untuk selalu meningkatkan kualitas diri baik dalam segi komunikasi dan kreatifitas dalam menarik minat pengunjung Taman Baca. Dengan

mengkomunikasikan dengan perangkat RW setempat permasalahan kekurangan fasilitas bisa teratasi. Harapan ke depan Taman Baca Rusun Sombo mampu meningkatkan minat baca orang dewasa bukan hanya anak-anak.

REFERENSI

- Abdul Wahab, S., 1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Amrin. 2011. *Acuan Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat*. Medan: Pustaka TBM MRD.
- Bafadal, Ibrahim. 1992. *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Darmono. 2001. *Manajemen dan Tata kerja Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: Grasindo.
- Dunn, William., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pree, 1998.
- Joko Widodo. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Surabaya: Bayumedia.
- Kaelan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Larasati Milburga, et al, 1991. *Membina Perpustakaan Sekolah*. Yogyakarta: Kanisius, p.17.
- Moleong, Lexy J, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy, PT Elex Media Komputindo*. Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Patilima, Hamid. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Solichin Abdul Wahab. 2002. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 71.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardji. 2001. *Mengelola Perpustakaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sulistyo Basuki, 2003. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Universitas Terbuka. Depdikbud, p.5.

Sutarno NS, 2003. *Perpustakaan dan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Van Meter, D.S and C.E Van Horn., 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, Administration and Society*

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pessindo.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku.

Sumber Lain:

Badan Pusat Statistik. (2013). *Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Propinsi, 2003-2013* [online] tersedia di <http://www.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik. (2013). *Indikator Sosial Budaya 2003, 2006, 2009, dan 2012* [online] tersedia di <http://www.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik. (2013). *Indikator Sosial Budaya 2003, 2006, 2009, dan 2012* [online] tersedia di <http://www.bps.go.id>

Norma Anggara. (2014). *Pemkot Surabaya Raih 2 Penghargaan MDG's di Bidang Sosial*, Ini Kata Risma [online] tersedia di <http://news.detik.com/surabaya>

Dinas Kesehatan Kota Surabaya. (2014). *Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan* [online] tersedia di <http://dinkes.surabaya.go.id>

Dinas Pendidikan Kota Surabaya. (2012). *Sekolah* [online] tersedia di <http://dispendik.surabaya.go.id/index.php/data-sekolah?resetfilters=0&limitstart3=1800>